



# RENCANA KERJA

## BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021



## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau Tahun 2021 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019–2024 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau memuat hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, tujuan dan sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau Tahun 2021 ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah yaitu pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan dan aset daerah dan juga untuk mendukung fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau Tahun 2021 ini.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



**INDRA, SE. M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721115 199803 1 004

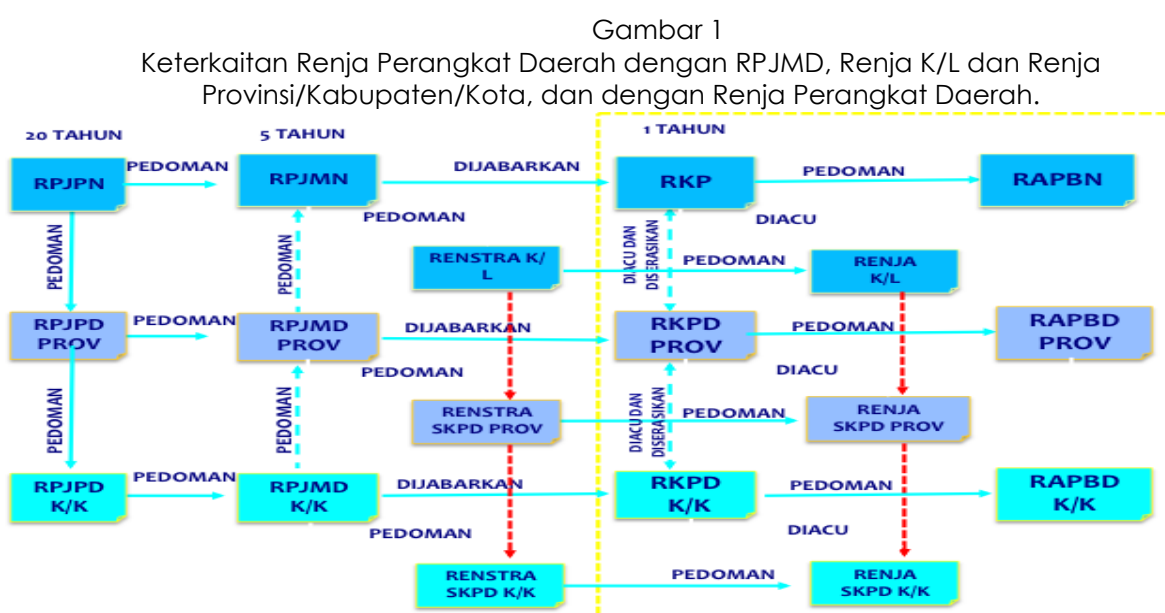
# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Badan, BPKAD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran Daerah dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Hubungan dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renja BPKAD Provinsi Riau, dengan Renja K/L dapat dilihat pada gambar berikut



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Mempedomani Pasal 126 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan Renja-SKPD. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja-SKPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 139 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Sehubungan dengan itu agar terlaksananya penyusunan dokumen Renja pada BPKAD Provinsi Riau yang selaras dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2021, perlu dilakukan Penyusunan Renja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2021.



## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis, yaitu:

1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a) Maksud**

Rencana Kerja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2021 disusun dengan maksud menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta sebagai pedoman bagi BPKAD Povinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 melalui pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

#### **b) Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja BPKAD Provinsi Riau.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2021 adalah:

1. Menjabarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Perangkat Daerah serta pihak terkait dalam upaya Pembangunan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2021.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024. BAB I terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II: HASIL EVALUASI HASIL RENJA BPKAD PROVINSI RIAU TAHUN 2019**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan subbab sebagai berikut.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra BPKAD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja BPKAD
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD**

##### **BAB V. PENUTUP**



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD**

Pada Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2021 dengan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang sudah disahkan. Dan selanjutnya dijabarkan pencapaian Target Renstra Perangkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019, dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Tahun 2019 dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada Tahun 2020 terjadi Bencana Non Alam yang melanda Indonesia bahkan dunia yaitu Pandemi Covid-19 yang menyebabkan Perlambatan Ekonomi. Sejalan dengan itu melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional mengarahkan agar pemerintah daerah melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan merasionalisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal sekurang - kurangnya 50% (lima puluh) persen. Berkenaan dengan hal tersebut pada Tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang anggarannya di *refocusing* dan di realokasi sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum berjalan maksimal sesuai dengan yang ditargetkan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan  
Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2020  
Provinsi Riau**

**OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4 )*	12
<b>3 00</b>										
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>									
<b>3 00 02 02</b>										
	<b>BPKAD</b>									
<b>3 00 02 02 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase layananan administrasi perkantoran yang baik</b>								BPKAD
3 00 02 02 01 001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	650 surat	650 surat	650 surat	100 %	162 surat	162 surat	162 surat	Sekretariat
3 00 02 02 01 002	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber daya air Dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa Komunikasi,Sumb er daya air dan listrik	48 rekening	48 rekening	48 rekening	100 %	48 rekening	48 rekening	48 rekening	Sekretariat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4 )*	12
3 00 02 02 01 004	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga dan jenis kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Sekretariat
3 00 02 02 01 6	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 unit	15 unit	15 unit	100 %	21 unit	21 unit	21 unit	Sekretariat
3 00 02 02 01 7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	55 jenis	55 jenis	55 jenis	100 %	57 jenis	57 jenis	57 jenis	Sekretariat
3 00 02 02 01 8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	27 jenis	27 jenis	27 jenis	100 %	27 jenis	27 jenis	27 jenis	Sekretariat
3 00 02 02 01 9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 jenis	13 jenis	13 jenis	100 %	13 jenis	13 jenis	13 jenis	Sekretariat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4 )*	12
3 00 02 02 01 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	17.225 porsi	17.225 porsi	14.367 porsi	83.41 %	11.490 porsi	11.490 porsi	8.036 porsi	Sekretariat
3 00 02 02 01 11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	500 kali	500 kali	500 kali	100 %	500 kali	500 kali	483 kali	Sekretariat
3 00 02 02 01 12	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	84 orang	84 orang	84 orang	100 %	84 orang	84 orang	84 orang	Sekretariat
3 00 02 02 01 13	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	9 Tenaga Keamanan	9 Tenaga Keamanan	9 Tenaga Keamanan	100 %	9 Tenaga Keamanan	9 Tenaga Keamanan	9 Tenaga Keamanan	Sekretariat
3 00 02 02 01 37	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	80 %	80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	80 %	Sekretariat
<b>3 00 02 02 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan</b>								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab	
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)		
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4 )*	12	
		<b>Prasarana Aparatur</b>									
3	00 02 02 02 6	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	5 UNIT,1 SET	5 UNIT, 1 SET	5 UNIT, 1 SET	100 %	5 UNIT,1 SET	5 UNIT, 1 SET	5 UNIT, 1 SET	Sekretariat
3	00 02 02 02 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	24 Unit	24 Unit	22 Unit	91.66 %	24 Unit	24 Unit	22 Unit	Sekretariat
3	00 02 02 02 9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100 %	28 Unit	36 Unit	28 Unit	Sekretariat
3	00 02 02 02 16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	50 unit	50 unit	50 unit	100 %	263 unit	263 unit	263 unit	Sekretariat
3	00 02 02 16	<b>Program Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>									



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4 )*	12
3 00 02 02 16 2	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS Perubahan APBD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Bidang Anggaran Daerah
3 00 02 02 16 3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran APBD	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100 %	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	Bidang Anggaran Daerah
3 00 02 02 16 4	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100 %	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	Bidang Anggaran Daerah
3 00 02 02 16 5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Bidang Anggaran Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab					
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)						
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4 )*	12					
		Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD												
3	00	02	02	16	6	Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah regulasi yang disusun	2 Dokumen Regulasi	2 Dokumen Regulasi	9 Dokumen Regulasi	450 %	2 Dokumen Regulasi	2 Dokumen Regulasi	9 Dokumen Regulasi	Bidang Anggaran Daerah
3	00	02	02	16	12	Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai	300 orang	300 Orang	300 Orang	100 %	300 orang	300 Orang	300 Orang	Bidang Perben dan Kasda
3	00	02	02	16	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah laporan data penerimaan daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Bidang Perben dan Kasda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3.00.02.02.16.16	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	Jumlah Revisi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua ; Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang Mengikuti Sosialisasi Revisi Kebijakan Akuntansi ; Jumlah Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Studi Komparatif terkait perubahan regulasi terhadap kebijakan akuntansi	2 buku ; 125 orang ; 5 orang	2 buku ; 125 orang ; 5 orang	2 buku ; 125 orang ; 5 orang	100 %	2 buku ; 125 orang ; 5 orang	2 buku ; 125 orang ; 5 orang	2 buku ; 125 orang ; 5 orang	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
3.00.02.02.16.17	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
3.00.02.02.16.18	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan,	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100 %	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	Bidang Akuntansi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab					
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)						
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12					
	Triwulan, Semesteran dan Tahunan									dan Pelaporan					
3	00	02	02	16	20	Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor	43 Entitas Akuntansi	43 Entitas Akuntansi	43 Entitas Akuntansi	100 %	43 Entitas Akuntansi	43 Entitas Akuntansi	43 Entitas Akuntansi	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
3	00	02	02	16	24	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi;	12 Kab/ Kota dan Lembaga Penerima bantuan	12 Kab/ Kota dan Lembaga Penerima bantuan	12 Kab/ Kota dan Lembaga Penerima bantuan	100 %	12 Kab/ Kota dan Lembaga Penerima bantuan	12 Kab/ Kota dan Lembaga Penerima bantuan	12 Kab/ Kota dan Lembaga Penerima bantuan	Sekretariat
3	00	02	02	16	25	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100 %	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	Sekretariat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3.00.02.02.16.26	Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur yang meningkat Pemahaman dan Kemampuannya dalam Penyusunan Anggaran Kabupaten/Kota ; Jumlah SK Evaluasi Ranperda tentang APBD dan SK Evaluasi Ranperda tentang P-APBD Kabupaten/Kota	420 orang ; 24 SK Gubernur	420 orang ; 24 SK Gubernur	420 orang ; 24 SK Gubernur	100 %	420 orang ; 24 SK Gubernur	420 orang ; 24 SK Gubernur	420 orang ; 24 SK Gubernur	Bidang Anggaran Daerah
3.00.02.02.16.27	Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Frekuensi Rapat Koordinasi Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota ; Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota ; Jumlah Kab/Kota yang dibina Pertanggungjawaban Keuangannya	1 kali Rakor ; 12 SK Gubernur Tentang Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota ; 12 Kab/Kota	1 kali Rakor ; 12 SK Gubernur Tentang Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota ; 12 Kab/Kota	1 kali Rakor ; 12 SK Gubernur Tentang Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota ; 12 Kab/Kota	100 %	1 kali Rakor ; 12 SK Gubernur Tentang Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota ; 12 Kab/Kota	1 kali Rakor ; 12 SK Gubernur Tentang Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota ; 12 Kab/Kota	1 kali Rakor ; 12 SK Gubernur Tentang Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota ; 12 Kab/Kota	Bidang Anggaran Daerah



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
3 00 02 02 16 29	Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium Keuangan Daerah									Bidang Anggaran Daerah
3 00 02 02 17	<b>Program Pembinaan Dan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan aset daerah yang berkualitas</b>								
3 00 02 02 17 1	Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Bidang PBMD
3 00 02 02 17 2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD	1 dokumen keputusan Kepala Daerah	1 dokumen keputusan Kepala Daerah	1 dokumen keputusan Kepala Daerah	100 %	1 dokumen keputusan Kepala Daerah	1 dokumen keputusan Kepala Daerah	1 dokumen keputusan Kepala Daerah	Bidang PBMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4 )*	12
3 00 02 02 17 3	Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Bidang PBMD
3 00 02 02 17 4	Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	7 Buku	7 Buku	7 Buku	100 %	7 Buku	7 Buku	7 Buku	Bidang PBMD
3 00 02 02 17 5	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah	2 Laporan Semesteran ; 1 laporan Tahunan	2 Laporan Semesteran ; 1 laporan Tahunan	2 Laporan Semesteran ; 1 laporan Tahunan	100 %	2 Laporan Semesteran ; 1 laporan Tahunan	2 Laporan Semesteran ; 1 laporan Tahunan	2 Laporan Semesteran ; 1 laporan Tahunan	Bidang PBMD
3 00 02 02 17 8	Pengamanan Administrasi dan	Jumlah jenis BMD yang diamankan secara	6 Jenis BMD	6 Jenis BMD	6 Jenis BMD	100 %	6 Jenis BMD	6 Jenis BMD	6 Jenis BMD	Bidang PBMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab					
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)						
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4 )*	12					
	Hukum Barang Milik Daerah	administrasi dan hukum													
3	00	02	02	17	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	100 %	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	Bidang PBMD
3	00	02	02	17	10	Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau	Jumlah Jenis BMD yang ditertibkan; Jumlah lokasi BMD yang ditertibkan;	3 Jenis BMD; 3 Lokasi	3 Jenis BMD; 3 Lokasi	3 Jenis BMD; 3 Lokasi	100 %	3 Jenis BMD; 3 Lokasi	3 Jenis BMD; 3 Lokasi	3 Jenis BMD; 3 Lokasi	Bidang PBMD
3	00	02	02	17	11	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	Bidang PBMD
3	00	02	02	17	12	Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi	3 jenis BMD	3 jenis BMD	3 jenis BMD	100 %	3 jenis BMD	3 jenis BMD	3 jenis BMD	Bidang PBMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD sampai dengan tahun berjalan		Unit Penanggung Jawab
				Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4 )*	12
3 00 02 02 17 13	Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta	250 Peserta	250 Peserta	250 Peserta	100 %	250 Peserta	250 Peserta	250 Peserta	Bidang PBMD

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa terdapat program dan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a) Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
- b) Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani;
- c) Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai target secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Suasana Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak bolehnya membuat kegiatan keramaian, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka tapi secara virtual.
- b) Akibat pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka pendanaan pandemi Covid-19.
- c) Adanya kegiatan yang tidak dijalankan karena kebijakan daerah;
- d) Adanya perubahan target kinerja terhadap kegiatan.

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target program dan kegiatan akan mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sehingga berdampak lambatnya pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Memperhatikan kondisi tersebut, kebijakan yang diambil oleh BPKAD Provinsi Riau untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- b. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Memprioritaskan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran kinerja perangkat daerah;
- d. Penetapan target indikator kinerja yang lebih terukur;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau bahwa BPKAD Provinsi Riau mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, sasaran yang ingin dicapai BPKAD Provinsi Riau adalah melalui Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau serta Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Ada 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur kinerja BPKAD Provinsi Riau sebagaimana terdapat dalam dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau adalah:

- a) Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau.
- b) Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau.
- c) Rata-rata waktu pemrosesan SPM.

- d) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- e) Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi.
- f) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD.
- g) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD.

Capaian kinerja IKU Pelayanan BPKAD Provinsi Riau dengan yang telah ditetapkan di dalam Renstra disajikan dalam format pada tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD**  
**Provinsi Riau**

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Proyeksi	
			2020	2021	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	11,52%	12,60%	11,33%	13,68%	14,76%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	91,66%	100%	91,66%	91,66%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerjanya BPKAD Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yang berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu diharapkan BPKAD Provinsi Riau dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsinya BPKAD Provinsi Riau yaitu dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah**

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang belum Optimal	Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;	Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, regulasi yang ada masih belum optimal
		Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual;	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
		Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;	Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
		Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;	Masih adanya perbedaan platform Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;	Adanya perbedaan format-format laporan dan kode rekening Belanja atau barang milik daerah pada modul-modul Sistem Informasi Keuangan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;	Adanya beberapa rekening belanja yang belum bisa untuk menggunakan pola transaksi non-tunai
2	Kualitas Kinerja SDM Pengelola Keuangan Belum Optimal	Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia	Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana
		Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan BPKAD Provinsi Riau	Keterbatasan SDM yang memahami tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Sumber : Renstra 2019 - 2024

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah diidentifikasi pada dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Permasalahan – permasalahan tersebut telah dianalisis secara mendalam dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun sampai dengan akhir perioder Renstra yaitu pada tahun 2024.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan BPKAD Provinsi Riau adalah tidak tercapainya Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”**. yang bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran:

- a) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
- b) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi diatas BPKAD Provinsi Riau akan meminimalisir tantangan – tantangan dan memaksimalkan peluang – peluang dalam Pelayanan Perangkat Daerah. Berikut tantangan adalah :

- a) Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
- b) Belum Efektifnya Operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Modul Penatausahaan sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c) Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;

- d) Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- e) Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.

Sesuai jabaran tantangan – tantangan diatas untuk meminimalisasi permasalahan BPKAD Provinsi Riau perlu memanfaatkan peluang – peluang semaksimalnya yaitu :

- a) reformasi birokrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Perubahan Regulasi
- b) Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM pada bidang layanan di BPKAD Provinsi Riau.
- c) Tenaga Informasi Teknologi (IT) yang dimiliki oleh BPKAD Provinsi Riau sudah sesuai dengan kompetensi
- d) Adanya anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
- e) Jumlah ASN yang berpendidikan Sarjana Strata 1 dan Strata 2.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, BPKAD Provinsi Riau menyusun program - program yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahunan yaitu:

1. Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Program-program tersebut didukung oleh kegiatan dengan tujuan mencapai kinerja organisasi dan visi misi Kepala Daerah.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diamanatkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kepada pemerintah daerah untuk disusun setiap tahunnya. RKPD ini pada dasarnya adalah Rencana Tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses penyandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan apabila adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Berdasarkan dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 Tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Adapun kondisi yang ditemukan pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 dengan membandingkannya dengan analisis kebutuhan BPKAD Provinsi Riau dapat dirumuskan sebagai berikut

- a) Antara RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 dan analisis kebutuhan BPKAD Provinsi Riau tidak terdapat rumusan Program dan kegiatan baru;
- b) Pagu perangkat daerah dan sebarannya pada tiap – tiap kegiatan sebagaimana terdapat pada Rancangan Awal RKPD ada yang bertambah analisis kebutuhan perangkat daerah karena target kinerja juga ditambah.
- c) Beberapa kegiatan pada Rancangan Awal RKPD ada koreksi target kinerja pada analisis kebutuhan BPKAD Provinsi Riau dan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang akan dilaksanakan.

Selain beberapa hal yang dikemukakan di atas, BPKAD Provinsi Riau perlu melakukan pemetaan kembali terhadap rumusan nomenklatur Program dan Kegiatan pada Tahun 2021 untuk dilakukan sinkronisasi terhadap dokumen RKPD Provinsi Riau Tahun 2021. Hal ini dikarenakan rumusan program yang ada dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Selanjutnya diturunkan ke dalam RKPD Tahun 2021 masih menggunakan nomenklatur lama sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berikut Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dengan Analisis Kebutuhan Awal Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2021**

Kode	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
3.0.02.02.0.0.00.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Prov. Riau	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>7,177,099,773.00</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Prov. Riau	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>7,177,099,773.00</b>
3.0.02.02.0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Prov. Riau	Jumlah surat yang dikirim	610 Surat	22,500,000.00	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Prov. Riau	Jumlah surat yang dikirim	610 Surat	22,500,000.00
3.0.02.02.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Riau	Jumlah rekening yang dibayar	48 Rekening	817,799,773.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Riau	Jumlah rekening yang dibayar	48 Rekening	817,799,773.00
3.0.02.02.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prov. Riau	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	290,000,000.00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Prov. Riau	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	290,000,000.00
3.0.02.02.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prov. Riau	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	21 Unit	300,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prov. Riau	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	21 Unit	300,000,000.00
3.0.02.02.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prov. Riau	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	66 Jenis	550,000,000.00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prov. Riau	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	66 Jenis	550,000,000.00
3.0.02.02.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Riau	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	30 Jenis	385,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Riau	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	30 Jenis	385,000,000.00
3.0.02.02.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Jenis	35,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Riau	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Jenis	35,000,000.00
3.0.02.02.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prov. Riau	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	14,100 Porsi	310,000,000.00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prov. Riau	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	14,100 Porsi	310,000,000.00
3.0.02.02.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prov. Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	500 Kali	867,500,000.00	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prov. Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	500 Kali	867,500,000.00



Kode	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
3.0.02.02.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Prov. Riau	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	85 OB	3,286,500,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Prov. Riau	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	85 OB	3,286,500,000.00
3.0.02.02.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Prov. Riau	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	11 Tenaga Keamanan	262,800,000.00	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Prov. Riau	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	11 Tenaga Keamanan	262,800,000.00
3.0.02.02.0.0.00.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Prov. Riau	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	50,000,000.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Prov. Riau	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	50,000,000.00
3.0.02.02.0.0.00.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Prov. Riau	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>500,000,000.00</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Prov. Riau	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>500,000,000.00</b>
3.0.02.02.0.0.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prov. Riau	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 Unit	75,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Prov. Riau	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 Unit	75,000,000.00
3.0.02.02.0.0.00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prov. Riau	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	30 Unit	250,000,000.00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Prov. Riau	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	30 Unit	250,000,000.00
3.0.02.02.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prov. Riau	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	100,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prov. Riau	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	100,000,000.00
3.0.02.02.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prov. Riau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung	75,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prov. Riau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung	75,000,000.00
<b>3.0.02.02.3.0.02.16.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Prov. Riau	<b>Persentase pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas</b>		<b>6,286,532,142.00</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Prov. Riau	<b>Persentase pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas</b>		<b>6,286,532,142.00</b>
3.0.02.02.3.0.02.16.002.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS Perubahan APBD	12 dokumen	449,236,000.00	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS Perubahan APBD	12 dokumen	449,236,000.00

Kode	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
3.0.02.02.3.0.02.16.003.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran APBD	10 dokumen	1,066,296,000.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran APBD	10 dokumen	1,066,296,000.00
3.0.02.02.3.0.02.16.004.	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan	Prov. Riau	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah	2 Pergub	112,567,200.00	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan	Prov. Riau	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah	2 Pergub	112,567,200.00
3.0.02.02.3.0.02.16.005.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 dokumen	1,074,410,000.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 dokumen	1,074,410,000.00
3.0.02.02.3.0.02.16.006.	Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	Prov. Riau	Jumlah regulasi yang disusun	2 regulasi	321,167,500.00	Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	Prov. Riau	Jumlah regulasi yang disusun	2 regulasi	321,167,500.00
3.0.02.02.3.0.02.16.012.	Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Prov. Riau	Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai	300 Orang	125,000,000.00	Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Prov. Riau	Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai	300 Orang	125,000,000.00
3.0.02.02.3.0.02.16.013.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Prov. Riau	Jumlah laporan data penerimaan daerah	12 Laporan	342,426,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Prov. Riau	Jumlah laporan data penerimaan daerah	12 Laporan	342,426,000.00
3.0.02.02.3.0.02.16.016.	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	Prov. Riau	Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan	125 Orang	200,000,000.00	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	Prov. Riau	Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan	125 Orang	200,000,000.00

Kode	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
3.0.02.02.3.0.02.16.017.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prov. Riau	Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	2 Dokumen	520,000,000.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prov. Riau	Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	2 Dokumen	520,000,000.00
3.0.02.02.3.0.02.16.018.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Prov. Riau	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	14 Laporan	385,000,000.00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Prov. Riau	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	14 Laporan	385,000,000.00
3.0.02.02.3.0.02.16.020.	Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	Prov. Riau	Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor	37 Entitas Akuntansi	190,000,000.00	Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	Prov. Riau	Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor	37 Entitas Akuntansi	190,000,000.00
3.0.02.02.3.0.02.16.024.	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Prov. Riau	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi; Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi;	12 kab/kota, 2 Rakor	112,096,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Prov. Riau	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi; Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi;	12 kab/kota, 2 Rakor	112,096,000.00
3.0.02.02.3.0.02.16.025.	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Prov. Riau	Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	2 Aplikasi	417,157,442.00	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Prov. Riau	Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	2 Aplikasi	417,157,442.00

Kode	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
3.0.02.02.3.0.02.16.026.	Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Riau	Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	24 SK	450,000,000.00	Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Riau	Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	24 SK	450,000,000.00
3.0.02.02.3.0.02.16.027.	Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Riau	Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 SK	321,176,000.00	Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Riau	Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 SK	321,176,000.00
3.0.02.02.3.0.02.16.035.	Penyusunan Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur Riau Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah		200,000,000.00	Penyusunan Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur Riau Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah		200,000,000.00
<b>3.0.02.02.3.0.02.17.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah</b>		<b>Persentase pengelolaan aset daerah yang berkualitas</b>		<b>2,021,058,819.00</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah</b>		<b>Persentase pengelolaan aset daerah yang berkualitas</b>		<b>2,021,058,819.00</b>
3.0.02.02.3.0.02.17.001.	Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	5 Dokumen	210,000,000.00	Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	5 Dokumen	210,000,000.00
3.0.02.02.3.0.02.17.002.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	Prov. Riau	Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD	1 Dokumen Keputusan KDH	110,000,000.00	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	Prov. Riau	Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD	1 Dokumen Keputusan KDH	110,000,000.00
3.0.02.02.3.0.02.17.003.	Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD	7 Dokumen	120,000,000.00	Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD	7 Dokumen	120,000,000.00

Kode	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.0.02.02.3.0.02.17.004.	Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	7 Dokumen	450,000,000.00	Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	7 Dokumen	450,000,000.00	
3.0.02.02.3.0.02.17.005.	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah	2 Laporan	100,000,000.00	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah	2 Laporan	100,000,000.00	
3.0.02.02.3.0.02.17.008.	Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Prov. Riau	Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum	5 Sertifikat	310,000,000.00	Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Prov. Riau	Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum	5 Sertifikat	310,000,000.00	
3.0.02.02.3.0.02.17.009.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prov. Riau	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	6 Lokasi	25,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prov. Riau	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	6 Lokasi	25,000,000.00	
3.0.02.02.3.0.02.17.010.	Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah Jenis BMD yang ditertibkan	3 Jenis BMD	177,000,000.00	Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah Jenis BMD yang ditertibkan	3 Jenis BMD	177,000,000.00	
3.0.02.02.3.0.02.17.011.	Penilaian Barang Milik Daerah	Prov. Riau	Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi	3 Jenis BMD	335,000,000.00	Penilaian Barang Milik Daerah	Prov. Riau	Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi	3 Jenis BMD	335,000,000.00	
3.0.02.02.3.0.02.17.012.	Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi	12 Kab/Kota	99,058,819.00	Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi	12 Kab/Kota	99,058,819.00	
3.0.02.02.3.0.02.17.013.	Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah peserta	150 Peserta	85,000,000.00	Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	Jumlah peserta	150 Peserta	85,000,000.00	
<b>JUMLAH</b>					<b>15,984,690,734.00</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>15,984,690,734.00</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan rangkaian pengelolaan keuangan daerah sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Fungsi yang erat kaitannya dengan usulan program dan kegiatan masyarakat adalah pengelolaan keuangan belanja hibah dan bantuan sosial pada fungsi PPKD. Belanja hibah dan bantuan sosial dimaksudkan untuk menampung usulan/aspirasi pemangku kepentingan sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Permendagri 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pada tahun 2021 terjadi perubahan postur belanja dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Penganggaran belanja hibah direncanakan dan dilaksanakan dalam rencana kerja OPD terkait sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Usulan kegiatan masyarakat tersebut disampaikan dalam bentuk proposal dan rekomendasi dari OPD terkait untuk diusulkan pada belanja OPD terkait di usulkan dan dianggarkan. Selain dari pengelolaan belanja BPKAD juga mulai melaksanakan tugas-tugas fasilitasi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Program Kemitraan antara Pemerintah dengan pihak swasta/BUMD di lingkungan Provinsi Riau dalam bentuk mendukung kepentingan sosial masyarakat dan kontribusi terhadap pembangunan.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Presiden 2020 – 2024 Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dengan Misi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan Misi diatas ada 7 Agenda Pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 – 2024 yaitu

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan hukum perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan kewajiban perangkat daerah, salah satunya adalah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau harus memperhatikan kebijakan – kebijakan di tingkat pusat terutama dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan urusan penunjang (keuangan).

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mengacu ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### **3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Keuangan**

Visi Kementerian Keuangan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Bekenaan dengan Vlsi diatas misi Kementrian Keuangan adalah:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien



Dalam rangka mendukung pencapaian 5 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 Sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2020 - 2024:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
  - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
  - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial;
  - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah;
  - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa Program di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan;
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

- Kementerian Keuangan;
3. Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara;
  4. Program Pengelolaan Anggaran Negara;
  5. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
  6. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara;
  7. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang;
  8. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan;
  9. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak;
  10. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
  11. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
  12. Program Integrasi Layanan Indonesia National Single Window

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Daerah tertuang Pasal 1 ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut kewenangan Gubernur semakin diperkuat.

Sesuai dengan uraian Renstra Kementerian Keuangan diatas tupoksi BPKAD Provinsi Riau yang terkait secara langsung adalah berkenaan dengan Program Pengelolaan Anggaran Negara, Program Perbendaharaan Negara, Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang serta Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis yang baik adalah apabila dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Selanjutnya, tujuan strategis organisasi dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran strategis.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam periode jangka waktu tertentu, dan dirumuskan dalam bentuk tindakan dan alokasi sumber daya sehingga dapat diukur. Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah, sehingga sasaran merupakan cara untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”**.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota”**.

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun.

Dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan tahun ke tiga dalam konteks perencanaan lima tahunan dari 2019 s.d 2024. Adapun tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.

**Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2022**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula	Target Capaian		
					2021	2022	
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau			Tepat waktu	Tepat waktu
			Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	$\frac{\text{Anggaran urusan Pendidikan}}{\text{Total APBD}} \times 100$		20%	20%
			Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	$\frac{\text{Anggaran urusan Kesehatan}}{\text{Total APBD}} \times 100$		10%	10%
			Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau			Tepat waktu	Tepat waktu
			Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan			2 Dokumen Regulasi	2 Dokumen Regulasi
			Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	$\frac{\text{Jumlah SP2D yang diterbitkan}}{\text{Jumlah SPM}} \times 100$		100%	100%
			Rata-rata waktu pemrosesan SPM			2 hari	2 hari
			Rasio likuiditas Pemprov Riau	$\frac{\text{Jumlah Belanja Daerah yang dapat dibayarkan}}{\text{Jumlah Belanja yang diajukan ke BUD}} \times 100$		100%	100%
			Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI			Tepat waktu	Tepat waktu
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			WTP	WTP
			Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$		100%	100%
			Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan			3 persil	3 persil
			Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan Yang Diproses}}{\text{Jumlah Usulan Pemanfaatan Aset Tetap}} \times 100$		87%	88%
			Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses			13 Usulan	14 Usulan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula	Target Capaian	
					2021	2022
			Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Yang Telah Diinventarisasi/Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan x 100	13,68%	14,76%
			Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	Jumlah Usulan RKBMD Yang Ditelaah/Jumlah Usulan RKBMD Pengguna Barang x 100	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Jumlah Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi/Jumlah Ranperda yang disampaikan x 100	100%	100%
			Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Evaluasi Ranperda APBD/Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau x 100	91,66%	91,66%
			Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Jumlah Ranperda Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota
			Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD/Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau x 100	100%	100%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Arah Kebijakan Nasional Tahun 2021 yaitu Pemulihan ekonomi dalam jangka pendek dan meletakkan fondasi transformasi sosial ekonomi dalam jangka panjang;
- b. Pagu indikatif dalam Rancangan Awal RKPD;
- c. Hasil kesepakatan para pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Riau;
- d. Realisasi Capaian sampai dengan tahun berjalan;
- e. Target Renstra BPKAD Provinsi Riau sampai Tahun 2024;
- f. Penyesuaian terhadap kondisi eksisting seperti adaptasi kebiasaan baru dampak pandemi Covid-19.
- g. Penyesuaian kegiatan yang dapat dilaksanakan di masa Pandemi Covid-19

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 disajikan pada tabel 3.2 berikut

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.0.0.00.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>7,177,099,773.00</b>	APBD Provinsi Riau			<b>8.409.540.000</b>
3.0.02.02.0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Prov. Riau	610 Surat	22,500,000.00	APBD Provinsi Riau		610 Surat	31.750.000
3.0.02.02.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Prov. Riau	48 Rekening	817,799,773.00	APBD Provinsi Riau		48 Rekening	866.045.757
3.0.02.02.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Prov. Riau	12 Bulan	290,000,000.00	APBD Provinsi Riau		12 Bulan	349.890.000
3.0.02.02.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Prov. Riau	21 Unit	300,000,000.00	APBD Provinsi Riau		21 Unit	389.850.000
3.0.02.02.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Prov. Riau	66 Jenis	550,000,000.00	APBD Provinsi Riau		66 Jenis	888.100.000
3.0.02.02.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Prov. Riau	30 Jenis	385,000,000.00	APBD Provinsi Riau		30 Jenis	574.590.000
3.0.02.02.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Prov. Riau	13 Jenis	35,000,000.00	APBD Provinsi Riau		13 Jenis	87.550.000
3.0.02.02.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Prov. Riau	14,100 Porsi	310,000,000.00	APBD Provinsi Riau		14,100 Porsi	396.865.388

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prov. Riau	500 Kali	867,500,000.00	APBD Provinsi Riau		500 Kali	1.141.445.255
3.0.02.02.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Prov. Riau	85 OB	3,286,500,000.00	APBD Provinsi Riau		85 OB	3.361.704.600
3.0.02.02.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Prov. Riau	11 Tenaga Keamanan	262,800,000.00	APBD Provinsi Riau		11 Tenaga Keamanan	262.899.000
3.0.02.02.0.0.00.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Prov. Riau	100 Persen	50,000,000.00	APBD Provinsi Riau		100 Persen	58.850.000
3.0.02.02.0.0.00.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>500,000,000.00</b>	APBD Provinsi Riau			<b>1.136.910.000</b>
3.0.02.02.0.0.00.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Prov. Riau			APBD Provinsi Riau		10 Unit	65.000.000
3.0.02.02.0.0.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Prov. Riau	10 Unit	75,000,000.00	APBD Provinsi Riau		30 Unit	219.500.000
3.0.02.02.0.0.00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Prov. Riau	30 Unit	250,000,000.00	APBD Provinsi Riau		50 Unit	285.949.000
3.0.02.02.0.0.00.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		50 Unit	100,000,000.00	APBD Provinsi Riau		3 Gedung	115.804.926
3.0.02.02.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Prov. Riau	3 Gedung	75,000,000.00	APBD Provinsi Riau		290 Unit	277.656.074

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.0.0.00.02.043.	Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor	Luasan gedung yang di rehab	Prov. Riau			APBD Provinsi Riau		45 m2	173.000.000
<b>3.0.02.02.0.0.00.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase tingkat kehadiran ASN</b>			<b>131.200.000</b>	APBD Provinsi Riau			<b>131.200.000</b>
3.0.02.02.0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan	Prov. Riau						
3.0.02.02.0.0.00.03.002.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	jumlah pakaian dinas yang diadakan	Prov. Riau			APBD Provinsi Riau		134 Unit	131.200.000
3.0.02.02.0.0.00.03.003.	Pengadaan Pakaian KORPRI	jumlah pakaian dinas yang diadakan	Prov. Riau						
<b>3.0.02.02.3.0.02.16.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas</b>			<b>6.286.532.142.00</b>	APBD Provinsi Riau			<b>6.984.870.000</b>
3.0.02.02.3.0.02.16.002.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS Perubahan APBD	Prov. Riau	12 dokumen	449,236,000.00	APBD Provinsi Riau		12 dokumen	524.526.024
3.0.02.02.3.0.02.16.003.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran APBD	Prov. Riau	10 dokumen	1,066,296,000.00	APBD Provinsi Riau		10 dokumen	957.730.224
3.0.02.02.3.0.02.16.004.	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Prov. Riau	2 Pergub	112,567,200.00	APBD Provinsi Riau		2 Pergub	123.823.920



Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.3.0.02.16.005.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prov. Riau	10 dokumen	1,074,410,000.00	APBD Provinsi Riau		10 dokumen	979.605.858
3.0.02.02.3.0.02.16.006.	Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah regulasi yang disusun	Prov. Riau	2 regulasi	321,167,500.00	APBD Provinsi Riau		2 regulasi	376.414.170
3.0.02.02.3.0.02.16.010.	Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran BLUD	Jumlah Peserta Koordinasi dan Evaluasi Anggaran BLUD Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau	Prov. Riau			APBD Provinsi Riau		120 Peserta	226.931.031
3.0.02.02.3.0.02.16.012.	Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai	Prov. Riau	300 Orang	125,000,000.00	APBD Provinsi Riau		300 Orang	153.603.290
3.0.02.02.3.0.02.16.013.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah laporan data penerimaan daerah	Prov. Riau	12 Laporan	342,426,000.00	APBD Provinsi Riau		12 Laporan	242.358.732
3.0.02.02.3.0.02.16.016.	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Aktual	Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan	Prov. Riau	125 Orang	200,000,000.00	APBD Provinsi Riau		125 Orang	234.772.598

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.3.0.02.16.017.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	Prov. Riau	2 Dokumen	520,000,000.00	APBD Provinsi Riau		2 Dokumen	584.800.467
3.0.02.02.3.0.02.16.018.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Prov. Riau	14 Laporan	385,000,000.00	APBD Provinsi Riau		14 Laporan	458.545.692
3.0.02.02.3.0.02.16.020.	Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor	Prov. Riau	37 Entitas Akuntansi	190,000,000.00	APBD Provinsi Riau		37 Entitas Akuntansi	214.674.504
3.0.02.02.3.0.02.16.024.	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi; Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi;	Prov. Riau	12 kab/kota, 2 Rakor	112,096,000.00	APBD Provinsi Riau		12 kab/kota, 2 Rakor	141.957.228
3.0.02.02.3.0.02.16.025.	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Prov. Riau	2 Aplikasi	417,157,442.00	APBD Provinsi Riau		2 Aplikasi	836.342.166

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.3.0.02.16.026.	Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Riau	24 SK	450,000,000.00	APBD Provinsi Riau		24 SK	538.752.984
3.0.02.02.3.0.02.16.027.	Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Riau	12 SK	321,176,000.00	APBD Provinsi Riau		12 SK	390.031.112
3.0.02.02.3.0.02.16.035.	Penyusunan Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur Riau Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah			200,000,000.00				
<b>3.0.02.02.3.0.02.17.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan aset daerah yang berkualitas</b>			<b>2,021,058,819.00</b>	APBD Provinsi Riau			<b>2.586.760.000</b>
3.0.02.02.3.0.02.17.001.	Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	5 Dokumen	210,000,000.00	APBD Provinsi Riau		5 Dokumen	248.512.294
3.0.02.02.3.0.02.17.002.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD	Prov. Riau	1 Dokumen Keputusan KDH	110,000,000.00	APBD Provinsi Riau		1 Dokumen Keputusan KDH	135.007.229
3.0.02.02.3.0.02.17.003.	Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD	Prov. Riau	7 Dokumen	120,000,000.00	APBD Provinsi Riau		7 Dokumen	144.383.660

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.3.0.02.17.004.	Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	7 Dokumen	450,000,000.00	APBD Provinsi Riau		7 Dokumen	387.608.313
3.0.02.02.3.0.02.17.005.	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah	Prov. Riau	2 Laporan	100,000,000.00	APBD Provinsi Riau		2 Laporan	120.154.880
3.0.02.02.3.0.02.17.008.	Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum	Prov. Riau	5 Sertifikat	310,000,000.00	APBD Provinsi Riau		5 Sertifikat	338.111.825
3.0.02.02.3.0.02.17.009.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Prov. Riau	6 Lokasi	25,000,000.00	APBD Provinsi Riau		6 Lokasi	410.305.853
3.0.02.02.3.0.02.17.010.	Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau	Jumlah Jenis BMD yang diterbitkan	Prov. Riau	3 Jenis BMD	177,000,000.00	APBD Provinsi Riau		3 Jenis BMD	190.432.180
3.0.02.02.3.0.02.17.011.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi	Prov. Riau	3 Jenis BMD	335,000,000.00	APBD Provinsi Riau		3 Jenis BMD	389.049.031
3.0.02.02.3.0.02.17.012.	Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi	Prov. Riau	12 Kab/Kota	99,058,819.00	APBD Provinsi Riau		12 Kab/Kota	109.225.026
3.0.02.02.3.0.02.17.013.	Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta	Prov. Riau	150 Peserta	85,000,000.00	APBD Provinsi Riau		150 Peserta	113.969.709
<b>JUMLAH</b>					<b>15.984,690,734.</b>				<b>19.249.280.000</b>

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilaksanakan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tabel 3.3 berikut adalah Hasil Pemetaan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2021 Berdasarkan PMDN No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

**Tabel 3.3**  
**Hasil Pemetaan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2021 Berdasarkan PMDN No.90 Tahun 2019**  
**Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.**

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								Non Urusan						
	0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	0.0.00.01.001.		Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim	610 Surat	22,500,000				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemdes/Tab				
							X.XX.01.1.08.01				Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Surat Yang Dikirim	500 surat	22,500,000
	0.0.00.01.002.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Rekening Yang	48 rekening	817,799,773	X.XX.01.1.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar	48 rekening	817,799,773
	0.0.00.01.007.		Penyediaan Alat Tulis	Jumlah jenis alat tulis kantor yang	66 jenis	550,000,000	X.XX.01.1.08.03				Penyediaan Peralatan dan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang	55 jenis	550,000,000
	0.0.00.01.012.		Penyediaan Jasa	Jumlah tenaga administrasi	960 OB	3,286,500,000	X.XX.01.1.08.04							
	0.0.00.01.004.		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	rentang waktu penyediaan jasa	12 bulan	290,000,000					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3,839,300,000
	0.0.00.01.013.		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang	11 Tenaga Kea	262,800,000								
	0.0.00.01.008.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	30 jenis	385,000,000	X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	30 jenis	385,000,000
	0.0.00.01.009.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	13 jenis	35,000,000					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	13 jenis	35,000,000
	0.0.00.01.010.		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	14100 porsi	310,000,000	X.XX.01.1.06.04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang	14100 porsi	310,000,000
	0.0.00.01.011.		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	500 kali	867,500,000	X.XX.01.1.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	500 kali	867,500,000
	0.0.00.02.037.		Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	50,000,000				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
							X.XX.01.1.03.06				Penatausahaan Barang Milik Daerah			50,000,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019								
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planni ng)	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	
											Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				
	0.0.00.02.006.		Pengadaan Perlengkapan			0									
	0.0.00.02.007.		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 unit	75,000,000									
	0.0.00.02.009.		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	30 unit	250,000,000									
	0.0.00.02.012.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	100,000,000	X.XX.01.1.09.09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	50 Unit	100,000,000
	0.0.00.01.006.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprational yang dipelihara	21 unit	300,000,000	X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas/oprational yang dipelihara	21 unit	300,000,000
	0.0.00.02.016.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 gedung	75,000,000	X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 gedung	75,000,000
	0.0.00.02.025.		Rehab Sedang dan Berat Gedung			0									
KEUANGAN							5.02	KEUANGAN							
	3.00.02.02.3.0.02.16.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN					5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN						
	3.00.02.02.3.0.02.16.002		Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS	12 Dokumen	449,236,000	5.02.02.1.01					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran			
							5.02.02.1.01.01					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS	12 dokumen	449,236,000
	3.00.02.02.3.0.02.16.003		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	1,066,296,000	5.02.02.1.01.					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan	10 dokumen	1,178

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning)	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
	3.00.02.02.3.0.02.16.004		Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah	2 Pergub	112,567,200					Daerah tentang Penjabaran APBD	KDH		
	3.00.02.02.3.0.02.16.005		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	1,074,410,000	5.02.02.1.01.08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH	10 dokumen	1,074,410,000
	3.00.02.02.3.0.02.16.006		Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi	Jumlah regulasi yang disusun	2 Regulasi	321,167,500	5.02.02.1.01.09				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi	Jumlah peserta desiminasi dan sosialisasi	2 Regulasi	321,167,500
	3.00.02.02.3.0.02.16.010		Koordinasi Dan Evaluasi											
	3.00.02.02.3.0.02.16.012		Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai	300 Orang	125,000,000	5.02.02.1.03			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
							5.02.02.1.03.01				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola	300 Orang	125,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.16.013		Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah laporan data penerimaan daerah	12 Laporan	342,426,000	5.02.02.1.03.09				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan	Jumlah laporan data penerimaan daerah	12 laporan	342,426,000
	3.00.02.02.3.0.02.16.030		Penyusunan Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur Riau Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	125 orang	200,000,000	5.02.02.1.03.10				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur Riau Revisi Sistim dan Prosedur	125 orang	200,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.16.016		Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan	125 Orang	200,000,000	5.02.02.1.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi				
							5.02.02.1.04.09				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Jumlah OPD Jumlah regulasi terkait SDM yang memahami	125 orang	200,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.16.017		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH	Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	2 Dokumen	520,000,000	5.02.02.1.04.05				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan	Persentase Penyampaian Ranperda dan Ranpergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tepat waktu	2 Dokumen	520,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.16.018		Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	14 Laporan	385,000,000	5.02.02.1.04.04				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi	14 laporan	385,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.16.020		Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor	37 Entitas akun	190,000,000	5.02.02.1.04.11				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor	37 Entitas akun	190,000,000



RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning)	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
	3.00.02.02.3.0.02.16.02.4.		Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat	12 Kab/Kota; 2	112,096,000	5.02.02.1.05			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
							5.02.02.1.05.08				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan			112,096,000
							5.02.02.1.05.09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			-
							5.02.02.1.05.10				Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi			-
	3.00.02.02.3.0.02.16.02.5.		Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	2 Aplikasi	417,157,442	5.02.02.1.06.02				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi	2 Aplikasi	417,157,442
	3.00.02.02.3.0.02.16.02.6.		Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	24 SK	450,000,000	5.02.02.1.02			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				
							5.02.02.1.02.02				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD	420 orang 24 SK Gubernur	252,531,000
							5.02.02.1.02.03				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	24 SK Gubernur	197,469,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning)	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
	3.00.02.02.3.0.02.16.02.7.		Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 SK	321,176,000	5.02.02.1.02.04				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala	Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	12 SK Kabupaten/Kota	130,000,000
							5.02.02.1.02.10				Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Terbinanya laporan pertanggungjawaban	12 kabupaten/kota	191,176,000
	3.00.02.02.3.0.02.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLA					5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK					
	3.00.02.02.3.0.02.17.00.1.		Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi	5 Dokumen	210,000,000	5.02.03.1.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah				
							5.02.03.1.01.01				Penyusunan Standar Harga			-
							5.02.03.1.01.03				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi	5 dokumen	210,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.17.00.2.		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD	1 Dokumen Kep	110,000,000	5.02.03.1.01.04				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD Terlatihnya pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	1 Dokumen Keputusan KDH 110 Pejabat pengelola barang	195,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.17.01.3.		Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta	150 Peserta	85,000,000								
	3.00.02.02.3.0.02.17.00.3.		Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD	7 Dokumen	120,000,000	5.02.03.1.01.12				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD	7 dokumen	120,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.17.00.4.		Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	7 Dokumen	450,000,000	5.02.03.1.01.06				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	7 dokumen	450,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.17.00.5.		Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah	2 Laporan	100,000,000	5.02.03.1.01.11				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum	2 Laporan	100,000,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019							
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning)	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
	3.00.02.02.3.0.02.17.008.		Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum	5 Sertifikat	310,000,000	5.02.03.1.01.07				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi	5 sertifikat	335,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.17.009.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	6 Lokasi	25,000,000								
	3.00.02.02.3.0.02.17.010.		Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan	Jumlah Jenis BMD yang ditertibkan	3 Jenis BMD	177,000,000	5.02.03.1.01.09				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis BMD yang ditertibkan	3 jenis BMD	177,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.17.011.		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi	3 Jenis BMD	335,000,000	5.02.03.1.01.08				Penilaian Barang Milik Daerah	Proses Pemindahtanganan	3 Jenis BMD	335,000,000
	3.00.02.02.3.0.02.17.012.		Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi	12 Kabupaten/	99,058,819	5.02.03.1.01.10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah	12 Kabupaten	99,058,819
<b>JUMLAH</b>						<b>15,984,690,734</b>								<b>15,984,690,734</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang bersifat teknis operasional, Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 – 2024 dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 dengan mempedomani Regulasi – regulasi Perencanaan yaitu Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mempedomani prosedur dan tahapan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, maka rumusan rencana kerja dan pendanaan yang terdiri atas program, kegiatan, indikator dan target capaian serta pagu indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dan Prakiraan maju Tahun 2022 dirumuskan dalam tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
<b>3.0.02.02.0.0.00.01.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>			<b>7,177,099,773.00</b>	APBD Provinsi Riau			<b>8.409.540.000</b>
3.0.02.02.0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Prov. Riau	610 Surat	22,500,000.00	APBD Provinsi Riau		630 Surat	31.750.000
3.0.02.02.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Prov. Riau	48 Rekening	817,799,773.00	APBD Provinsi Riau		48 Rekening	866.045.757
3.0.02.02.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Prov. Riau	12 Bulan	290,000,000.00	APBD Provinsi Riau		12 Bulan	349.890.000
3.0.02.02.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Prov. Riau	21 Unit	300,000,000.00	APBD Provinsi Riau		21 Unit	389.850.000
3.0.02.02.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Prov. Riau	66 Jenis	550,000,000.00	APBD Provinsi Riau		66 Jenis	888.100.000
3.0.02.02.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Prov. Riau	30 Jenis	385,000,000.00	APBD Provinsi Riau		30 Jenis	574.590.000
3.0.02.02.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Prov. Riau	13 Jenis	35,000,000.00	APBD Provinsi Riau		13 Jenis	87.550.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Prov. Riau	14,100 Porsi	310,000,000.00	APBD Provinsi Riau		14,100 Porsi	396.865.388
3.0.02.02.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prov. Riau	500 Kali	867,500,000.00	APBD Provinsi Riau		500 Kali	1.141.445.255
3.0.02.02.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Prov. Riau	85 OB	3,286,500,000.00	APBD Provinsi Riau		85 OB	3.361.704.600
3.0.02.02.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Prov. Riau	11 Tenaga Keamanan	262,800,000.00	APBD Provinsi Riau		12 Tenaga Keamanan	262.899.000
3.0.02.02.0.0.00.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Prov. Riau	100 Persen	50,000,000.00	APBD Provinsi Riau		100 Persen	58.850.000
3.0.02.02.0.0.00.02.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>500,000,000.00</b>	APBD Provinsi Riau			<b>1.136.910.000</b>
3.0.02.02.0.0.00.02.006.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	Prov. Riau	10 Unit		APBD Provinsi Riau		10 Unit	65.000.000
3.0.02.02.0.0.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Prov. Riau	30 Unit	75,000,000.00	APBD Provinsi Riau		70 Unit	219.500.000
3.0.02.02.0.0.00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Prov. Riau	50 Unit	250,000,000.00	APBD Provinsi Riau		50 Unit	285.949.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.0.0.00.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		3 Gedung	100,000,000.00	APBD Provinsi Riau		3 Gedung	115.804.926
3.0.02.02.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Prov. Riau	290 Unit	75,000,000.00	APBD Provinsi Riau		290 Unit	277.656.074
3.0.02.02.0.0.00.02.043.	Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor	Luasan gedung yang di rehab	Prov. Riau	45 m2		APBD Provinsi Riau		50 m2	173.000.000
<b>3.0.02.02.0.0.00.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase tingkat kehadiran ASN</b>			<b>131.200.000</b>	APBD Provinsi Riau			<b>131.200.000</b>
3.0.02.02.0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan	Prov. Riau						
3.0.02.02.0.0.00.03.002.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	jumlah pakaian dinas yang diadakan	Prov. Riau	134 Unit		APBD Provinsi Riau			131.200.000
3.0.02.02.0.0.00.03.003.	Pengadaan Pakaian KORPRI	jumlah pakaian dinas yang diadakan	Prov. Riau					134 Unit	
<b>3.0.02.02.3.0.02.16.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas</b>			<b>6,286,532,142</b>	APBD Provinsi Riau			<b>6.984.870.000</b>
3.0.02.02.3.0.02.16.002.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS APBD dan KUPA - PPAS Perubahan APBD	Prov. Riau	12 dokumen	449,236,000	APBD Provinsi Riau		12 dokumen	524.526.024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.3.0.02.16.003.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran APBD	Prov. Riau	10 dokumen	1,066,296,000	APBD Provinsi Riau		10 dokumen	957.730.224
3.0.02.02.3.0.02.16.004.	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan	Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Prov. Riau	2 Pergub	112,567,200	APBD Provinsi Riau		2 Pergub	123.823.920
3.0.02.02.3.0.02.16.005.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Prov. Riau	10 dokumen	1,074,410,000	APBD Provinsi Riau		10 dokumen	979.605.858
3.0.02.02.3.0.02.16.006.	Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah regulasi yang disusun	Prov. Riau	2 regulasi	321,167,500.00	APBD Provinsi Riau		2 regulasi	376.414.170
3.0.02.02.3.0.02.16.010.	Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran BLUD	Jumlah Peserta Koordinasi dan Evaluasi Anggaran BLUD Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau	Prov. Riau	120 Peserta		APBD Provinsi Riau		120 Peserta	226.931.031
3.0.02.02.3.0.02.16.012.	Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai	Prov. Riau	300 Orang	125,000,000.00	APBD Provinsi Riau		300 Orang	153.603.290
3.0.02.02.3.0.02.16.013.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah laporan data penerimaan daerah	Prov. Riau	12 Laporan	342,426,000.00	APBD Provinsi Riau		12 Laporan	242.358.732



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.3.0.02.16.016.	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua	Jumlah SDM Akuntansi yang ditingkatkan	Prov. Riau	125 Orang	200,000,000.00	APBD Provinsi Riau		125 Orang	234.772.598
3.0.02.02.3.0.02.16.017.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Ranperda dan ranpergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	Prov. Riau	2 Dokumen	520,000,000.00	APBD Provinsi Riau		2 Dokumen	584.800.467
3.0.02.02.3.0.02.16.018.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Prov. Riau	14 Laporan	385,000,000.00	APBD Provinsi Riau		14 Laporan	458.545.692
3.0.02.02.3.0.02.16.020.	Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor	Prov. Riau	37 Entitas Akuntansi	190,000,000.00	APBD Provinsi Riau		37 Entitas Akuntansi	214.674.504

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.3.0.02.16.024.	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi; Jumlah Kab/Kota yang menerima bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial, dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota; Jumlah Rapat Koordinasi;	Prov. Riau	12 kab/kota, 2 Rakor	112,096,000.00	APBD Provinsi Riau		12 kab/kota, 2 Rakor	141.957.228
3.0.02.02.3.0.02.16.025.	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Prov. Riau	2 Aplikasi	417,157,442.00	APBD Provinsi Riau		3 Aplikasi	836.342.166
3.0.02.02.3.0.02.16.026.	Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Hasil Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Riau	24 SK	450,000,000.00	APBD Provinsi Riau		24 SK	538.752.984
3.0.02.02.3.0.02.16.027.	Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Prov. Riau	12 SK	321,176,000.00	APBD Provinsi Riau		12 SK	390.031.112

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.3.0.02.16.035.	Penyusunan Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur Riau Revisi Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah			200,000,000				
<b>3.0.02.02.3.0.02.17.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan aset daerah yang berkualitas</b>			<b>2,021,058,819.00</b>	APBD Provinsi Riau			<b>2.586.760.000</b>
3.0.02.02.3.0.02.17.001.	Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelola Barang tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	5 Dokumen	210,000,000	APBD Provinsi Riau	5 Dokumen	248.512.294	
3.0.02.02.3.0.02.17.002.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD	Prov. Riau	1 Dokumen Keputusan KDH	110,000,000	APBD Provinsi Riau	1 Dokumen Keputusan KDH	135.007.229	
3.0.02.02.3.0.02.17.003.	Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD	Prov. Riau	7 Dokumen	120,000,000	APBD Provinsi Riau	7 Dokumen	144.383.660	
3.0.02.02.3.0.02.17.004.	Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Prov. Riau	7 Dokumen	450,000,000	APBD Provinsi Riau	7 Dokumen	387.608.313	
3.0.02.02.3.0.02.17.005.	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah	Prov. Riau	2 Laporan	100,000,000	APBD Provinsi Riau	2 Laporan	120.154.880	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
3.0.02.02.3.0.02.17.008.	Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum	Prov. Riau	5 Sertifikat	310,000,000	APBD Provinsi Riau		6 Sertifikat	338.111.825
3.0.02.02.3.0.02.17.009.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Prov. Riau	6 Lokasi	25,000,000	APBD Provinsi Riau		6 Lokasi	410.305.853
3.0.02.02.3.0.02.17.010.	Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau	Jumlah Jenis BMD yang ditertibkan	Prov. Riau	3 Jenis BMD	177,000,000	APBD Provinsi Riau		3 Jenis BMD	190.432.180
3.0.02.02.3.0.02.17.011.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Penilaian BMD yang Terdokumentasi	Prov. Riau	3 Jenis BMD	335,000,000	APBD Provinsi Riau		3 Jenis BMD	389.049.031
3.0.02.02.3.0.02.17.012.	Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Jumlah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi	Prov. Riau	12 Kab/Kota	99,058,819	APBD Provinsi Riau		12 Kab/Kota	109.225.026
3.0.02.02.3.0.02.17.013.	Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta	Prov. Riau	150 Peserta	85,000,000	APBD Provinsi Riau		150 Peserta	113.969.709
					<b>15.984.690.734</b>				<b>19.249.280.000</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Renstra 2019 – 2024 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2021, maka penetapan Prioritas Pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi sesuai dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Riau maupun dengan instansi terkait lainnya.

Dengan disusunnya Dokumen Renja ini diharapkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 dapat berjalan secara lebih terarah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Riau serta tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 dan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019 – 2024.

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pejabat dan aparatur di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**Jln. Cut Nyak Dien No.02, Pekanbaru**

*e-mail : [plannerbpkad@gmail.com](mailto:plannerbpkad@gmail.com)*

*[www. bpkad.riau.go.id](http://www.bpkad.riau.go.id)*